

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam ialah agama yang universal, agama yang mengantarkan kepada *misi rahmatan lil alamin* serta membawa konsep kepada umat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem seperti konsep politik, perekonomian, penegakan hukum dan lain-lain. Dalam bidang politik misalnya, Islam mendiaminya sebagai sarana penjagaan urusan umat (*ri'ayah syu-un al-ummah*).¹ Islam sendiri tidak hanya diartikan sebagai sebuah agama, melainkan lebih dari itu. Islam juga dapat dipahami sebagai suatu sistem kehidupan yang meliputi persoalan serluruh bidang kehidupan manusia, seperti yang tertuang dalam ayat al-qur'an di bawah ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal. (Q.S. Al-Hujurat: 13)*²

¹ Ridwan, "Hubungan Islam dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna," *Jurnal Hukum*, no. 02, (Juli-Desember 2017):

² Kastolani, "Hikmah Surat Al-Hujurat Ayat 13", Desember, 26, 2021. <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/surat-al-hujurat-ayat-13-arti-latin-makna>

Bahkan *Schachat* mengatakan dalam *Encyclopedia of the Social Science* bahwa Islam bukan sekedar agama, tetapi juga tentang ideologi politik dan hukum yang sudah direalisasikan dalam kekuasaan terbesar di berbagai negara sampai hari ini.³ Menurut Ibnu Khaldun, agama tetap menjadi posisi yang penting sebagai kebenaran yang harus diwujudkan pada realitas yang ada dan Agama sebagai ladasan pembangunan suatu negara, pemersatu dan sebagai sumber legitimasi kekuasaan politik yang akan membuat negara tak terkalahkan. Muhammad Imarah juga menegaskan bahwa Islam adalah agama juga sekaligus sistem pemerintahan. Dan dalam aliran Barat, terdapat pemisah antara agama dan negara. Sedangkan dalam Islam, terdapat adanya hubungan akidah, syariah, agama, dan pemerintahan.⁴

Pandangan Mayoritas Muslim termasuk para sarjana Muslim mengenai hubungan Islam dan Negara ialah bahwa Islam mencangkup agama dan siyasah (politik). Bahkan *Mahmud Syaltout* menegaskan *al-Islam din wa dawlah* (Islam itu agama dan negara). Islam sebagai agama ialah risalah Tuhan yang paripurna yang meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk memahami masalah-masalah politik dan negara itu sebabnya, Islam memiliki ajaran *Kaffah*. Pandangan semacam ini akan membuat semua orang meyakini Islam sebagai suatu totalitas ajaran dan prkateknya dalam kehidupan sehingga, mereka dibebani untuk menegakan keyakinannya itu dalam berbangsa

³ Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan", *Jurnal Kalimah*, no. 01, (01 Maret 2015): 207.

⁴ *Ibid.*,203-204.

dan bernegara.⁵

Secara global di dunia Islam sendiri terdapat tiga aliran mengenai hubungan Islam dan Ketatanegaraan. *Aliran pertama*, berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap, yang mencakup pengaturan bagi semua aspek manusia termasuk ketatanegaraan. *Aliran kedua*, berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, Islam tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan karena Nabi Muhammad SAW bukanlah sebagai kepala negara melainkan hanya seorang utusan Allah SWT. *Aliran ketiga*, berpendapat bahwa aliran ini menolak Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, namun juga menolak pendapat bahwa Islam tidak ada hubungan sama sekali dengan ketatanegaraan. Aliran ini mengatakan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara⁶

Ada satu riwayat lagi yang kuat di kalangan kebanyakan umat Islam, yaitu terdapat doktrin yang berbunyi *al-Islam huwa al-din wa 'l-dawlah*, Islam adalah agama sekaligus kekuasaan. Implikasi dari hubungan ini, antara agama dan negara, antara aspek ritual dan politik, sangat erat kaitannya, bahkan tidak bisa dipisahkan. Sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan, Islam sering dianggap sesuatu yang lebih dari sekedar agama. Ada yang melihatnya sebagai suatu “masyarakat sipil”, ada juga sebagai suatu sistem “peradaban yang menyeluruh”, bahkan pula,

⁵ Zakiyuddin Baidhawry, “Memecahkan Kebuntuan Teoritik Hubungan Islam dan Politik”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, no. 02, (esember 2012): 261.

⁶ Muhammad Fauzan Naufal, “Hubungan Agama dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Efendy),” (Skripsi, UIN Lampung, 2017): 4.

ada yang meyakini sebagai agama dan negara. Lebih spesifik lagi, Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal. Sebaliknya, Islam memberikan panduan etis bagi setiap aspek kehidupan.⁷

Dari keberagaman corak pemikiran dalam Islam, khususnya pemikiran politik, Islam tidak akan bisa melepaskan dirinya dari yang namanya politik, entah itu dari dimensi historis ataupun dari dimensi doktrin Islam itu sendiri. Walaupun demikian diskursus mengenai Islam dan politik tidak berjalan melainkan terus berkembang menjadi diskursus yang melahirkan banyak khazanah pemikiran yang kemudian melahirkan perdebatan dan juga perbedaan mengenai cara memahami hubungan Islam dan politik.⁸ Islam dan politik tidak bisa dipisahkan, karena Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya umat muslimin yang tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan menjalankan syariat Islam. Sebaliknya juga, politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagung-agungkan kekuasaan, jabatan, bahan, dan duniawi saja, serta kosong dari aspek moral dan spiritual. Karenanya, politik dalam Islam sangat penting untuk mengingatkan akan kemerdekaan dan kebebasan melaksanakan syariat Islam boleh

⁷ Zaprul Khan, "Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam," *Walisono*, no. 01 (Mei 2014): 106.

⁸ Amirullah, "Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmiah Kreatif*, no. 02, (Juli 2015): 2.

diwadahi oleh politik.⁹

Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan politik/negara ini sudah lama di perbincangkan di kalangan kaum terpelajar, cerdik cendikia, dan para politisi¹⁰. Di Indonesia sendiri hubungan antara Islam dan Negara (umat Islam dan kekuasaan) meninggalkan sejarah panjang yang sangat melelahkan. Tatkala politik dihubungkan dengan Islam yang notabene sebagai agama yang mengajarkan tentang *rahmatan lil'alam*, ajaran universal yang mengatur kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, tentu mau tidak mau Islam tidak bisa melepaskan dirinya dari kehidupan politik begitu juga sebaliknya politik merupakan bagian dari doktrin Islam itu sendiri¹¹

Di Indonesia perbincangan soal perlu atau tidaknya peran Islam dalam negara sudah dimulai sejak negara ini belum merdeka. Terbukti saat sidang BPUPKI hampir seluruh anggota memilih Indonesia menjadi negara republik. Tetapi, setelah diskusi tentang posisi Islam di dalam kehidupan bernegara, *The founding father* atau bapak pendiri bangsa berhasil mencapai kesepakatan bahwa Negara Republik Indonesia bukan sebuah Negara Teokrasi, melainkan negara yang didalamnya ada Islam dan kehidupan berislam yang mendapat tempat yang sangat

⁹ Ridwan, "Hubungan Islam dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna," *Jurnal Hukum*, no. 02, (Juli-Desember 2017): 224.

¹⁰ Zakiyuddin Baidhawiy, "Memecahkan kebuntuan teoretik hubungan Islam dan Politik," *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, no. 02, (Desember 2012): 259.

¹¹ Amirullah, "Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmiah Kreatif*, no. 02, (Juli 2015): 1-2.

terhormat dan dilindungi seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 29.¹² Karena Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam jadi, keterlibatan agama dalam merespon berbagai masalah kehidupan sosial semakin terasa signifikan. termasuk dalam menempatkan hubungan yang memungkinkan antara agama dan negara. Masalah ini sering menjadi problem yang bersifat mendasar, tetapi tidak seluruhnya disebabkan oleh perbedaan pandangan namun, salah satu point terpenting dalam perbedaan pendapat adalah apakah negara ini bercorak Islam atau nasional.¹³

Pembahasan mengenai hubungan Islam dan negara/politik ternyata telah banyak melibatkan tokoh-tokoh pemikir kontemporer bahkan sebelum Indonesia ini merdeka. Salah satu tokoh pemikir Indonesia tersebut ialah Ahmad Syafii Maarif. Ia merupakan seorang intelektual yang banyak mengalami transformasi pemikiran yang sangat kontras. Ahmad Syafii Maarif berubah menjadi seorang Intelektual Islam yang lebih terbuka yang mendukung Ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia setelah Ahmad Syafii Maarif bertemu dengan Fazlur Rahman ketika kuliah di Chicago AS.¹⁴ Ahmad Syafii Maarif ini sebagai salah satu intelektual Muslim yang sangat berpengaruh di Indonesia, tentu saja pemikiran dan pandangannya

¹² Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan", *Jurnal Kalimah*, no. 01, (01 Maret 2015): 200.

¹³ Muhammad Fauzan Naufal, Hubungan Agama dan Negara Dalam Pemikiran politik Islam DI Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Efendy), (Skripsi, UIN Randen Intan Lampung, 2017), 4-5.

¹⁴ Leni Marlana, "Hubungan Islam dan Negara Dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif," *Manthiq*, no. 02, (2018): 22.

tentang relasi agama dalam hal ini adalah Islam, dan negara/politik menemukan momentum yang tepat di saat bangsa ini banyak dibelit berbagai permasalahan, terutama mengenai ideologi negara.¹⁵

Pemikiran tentang hubungan Islam dan negara terus mengalami dinamika perkembangan di Indonesia.¹⁶ Yang telah terjadi di masa orde lama serta akibat yang ditimbulkan yaitu lahirnya masa Orde Baru. Memunculkan respon umat Islam dalam menyambut Orde Baru yang begitu di nantikan oleh umat Islam. Dimasa Orde Baru inilah nanti akan dilihat bagaimana dinamika umat Islam ketika berhadapan dengan sebuah negara yang baru itu.¹⁷ Dan agama Islam sudah sangat berperan penting dalam perpolitikan kenegaraan untuk mempersatukan seluruh masyarakat dalam ikatan perjanjian politik kenegaraan, bukan dalam suatu ikatan ideologi agama khususnya Islam.¹⁸

Berawal dari latar belakang yang sudah dipaparkan, bahwasanya sangat penting sekali mengetahui bagaimana pandangan Ahmad Syafii Maarif tentang hubungan Islam dan politik. Karena itu, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam judul: "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru (1966-1998) Menurut Perspektif Ahmad Syafii

¹⁵ Ahmad Asroni, "Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Negara dan Syariat Islam Di Indonesia," *Milah*, no. 02, (Februari 2011), 359-360.

¹⁶ M Marfirozi, *Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Amien Rais Tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia*, (Skripsi, UIN Jakarta, 2019), 5.

¹⁷ Okrisal Eka Putra, "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru", *Jurnal Dakwah*, no. 2 { juli-Desember 2018 }:185.

¹⁸ Moh Dhlani, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia," *Jurnal Studi Keislaman*, no. 01, (Juni 2014): 3.

Maarif². Diharapkan penelitian ini akan memberikan sebuah gambaran tentang pemikiran dari Ahmad Syafii Maarif.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, bahwasanya sangat penting sekali untuk mengetahui:

1. Bagaimana Islam dan Politik Pada Masa Orde Baru?
2. Bagaimana hubungan Islam dan Politik Pada Masa Orde Baru menurut perspektif Ahmad Syafii Maarif?
3. Dampak Relasi Islam dan Politik Pada Masa Orde Baru menurut pespektif Ahmad Syafii Maarif

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk menjabarkan ruang lingkup agar nantinya penelitian ini menjadi terarah. Dengan judul penelitian tentang ‘Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Masa Orde Baru Menurut Perspektif Ahmad Syafii Maarif²’. Dalam hal ini, peneliti hanya memfokuskan kajiannya seputar Agama Islam, yang kemudian dikaitkan dengan politik. Dengan pengambilan tempat di wilayah Indonesia dengan mengambil periode Orde Baru. Karena masa orde baru menjadi periode dimulainya kiprah dari Ahmad Syafii Maarif. Dan tokoh yang akan menjadi fokus penelitian ini ialah Ahmad Syafii Maarif. Tokoh ini mempunyai andil yang sangat besar terhadap persoalan Islam di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat

Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Islam dan Politik pada masa orde baru..
2. Untuk mengetahui hubungan Islam dan politik pada masa orde baru menurut perspektif Ahmad Syafii Maarif.
3. Untuk mengetahui dampak relasi Islam dan Politik pada masa orde baru menurut perspektif Ahmad Syafii Maarif.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini berkenaan dengan manfaat ilmiah dan praktis dari hasil penelitian.

1. Kegunaan Ilmiah

Dalam hal ini berguna untuk memberikan wawasan baru terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang masih memiliki hubungan dengan bidang yang sedang dipelajari. Yaitu memberikan pengetahuan baru/wawasan baru terhadap perkembangan tokoh pemikiran di Indonesia khususnya mengenai hubungan Islam dan politik.

2. Kegunaan Praktis

Dalam hal ini, berguna untuk memberikan informasi kepada pembaca seputar hubungan Islam dan politik di Indonesia yang dilihat menurut perspektif Ahmad Syafii Maarif.

F. Landasan Teori

1. Definisi Hubungan

Menurut ilmu sosiologi, hubungan sosial dimaknai sebagai hubungan yang terjadi antara individu satu dan lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. atau bahkan antara kelompok dengan individu itu sendiri. Hubungan sosial terbagi menjadi dua bentuk yakni hubungan asosiatif dan

disosiatif. Pola hubungan asosiatif merupakan pola hubungan yang positif bersifat mempersatukan dan menghasilkan keturunan. Berbeda dengan hubungan disosiatif atau *oppositional processes*, yaitu hubungan yang bersifat pertentangan dengan orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan.¹⁹

Hubungan sosial asosiatif terbagi menjadi tiga yakni: kerja sama, akomodasi dan asimilasi. Kerja sama terjadi apabila orang tersebut menyadari adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang sama memiliki cakupan dan pengendalian terhadap diri mereka. Akomodasi merupakan sesuatu proses adaptasi atau penyesuaian diri. Akomodasi juga merupakan cara penyelesaian kawan tanpa menafikan pihak lawan . Asimilasi adalah proses sosial untuk mengurangi perbedaan-perbedaan pada perorang atau kelompok-kelompok serta untuk meningkatkan kesatuan dan sikap agar tujuan tercapai bersama. Sama halnya dengan asosiatif, hubungan disosiatif juga terbagi lagi menjadi tiga yakni: persaingan (*competition*), kontroversi (*controversy*), dan pertentangan atau pertikaian (*conflict*).²⁰

2. Pengertian Agama Islam

Islam adalah agama yang mengatur seluruh umat manusia agar selamat, sejahtera, aman, damai, dan menyerahkan diri kepada Allah SWT,. Patuh dan tunduk kepadanya, serta mau beribadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Kesempurnaan keunikan, dan kecocokan ajaran Islam dalam

¹⁹ A Muchaddam Faham, "Dinamika Hubungan Antarumat Beragama: Pola Hubungan Muslim dan Hindu di Bali," *Jurnal Masalah-masalah Sosial*, no. 01, (Juni, 2018): 65.

²⁰ A Muchaddam Faham, *Ibid.*, 65.

kehidupan manusia. baik kehidupan masa lalu, masa kini masa yang akan datang, jelas memberikan pandangan yang luas kepada manusia bahwa Islam mempunyai konsepsi yang matang, terarah dan sesuai dengan perkembangan zaman, yang sebagian besar ditandai dengan akselerasi peradaban, rekayasa, industri dan teknologi.

Orang muslim adalah sebutan untuk orang yang telah masuk Islam, yaitu orang yang menyatakan dirinya, taat dan patuh kepada perintah Allah SWT. Dengan mengucapkan kalimat syahadat, orang ini akan terjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, Islam ialah agama yang membawa seluruh umatnya kepada misi keselamatan dunia akhirat, kesejahteraan, kemakmuran lahir dan batin dengan cara menunjukkan kepatuhan, ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan, dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Islam sebagai agama yang mayoritas, keberadaanya menjadi agama yang ramah, terbuka dan menjadi solusi atas semua berbagai permasalahan yang ada, khususnya masalah-masalah yang terkait dengan bangsa dan negara.²¹ Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, sejak 2009 telah menunjukkan realitas di mana pandangan dan teori-teori mengenai hubungan Islam dan Politik yang sudah ada tidak lagi memadai untuk membaca fenomena mutakhir ini. Faktanya Indonesia telah melukiskan dinamika hubungan Islam

²¹ Abd, Rohim Ghazali, *Merawat pemikiran Buya Sayfii*, (Jakarta: MAARIF Institute For Culture and Humanity, 2019), 344.

dan politik yang progresif.²²

3. Pengertian Politik

Pertama kali munculnya kata politik itu ialah dari kata *polis* yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti negara atau kota yang didalamnya terdapat sekelompok individu yang bernama masyarakat, pemerintah yang mengatur, melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat. Dan terdapat sebuah wilayah dengan batas tertentu yang didalamnya ada pemerintah dan masyarakat. Yang dikatakan politik oleh Plato dan Aristoteles itu ialah sebagai *en dam onia* atau *the good life* atau yang mempunyai maksud untuk melindungi dan mencapai sebuah tujuan masyarakat yang sejahtera. Selain Plato dan Aristoteles Harold Lasswell dan David Easton juga mengatakan bahwa politik sebagai *The authoritative allocation of values for a society* yaitu alokasi nilai-nilai secara otomatis, berdasarkan kewenangan serta untuk sebuah masyarakat.²³ Terdapat konsep dasar dalam politik yaitu:

Pertama, kekuasaan. Menurut Steven Lukes dalam bukunya *Power: A Radical View* diterbitkan pada tahun 1974. Bahwa kekuasaan adalah sebuah pokok persoalan mendasar yang ada kaitannya dengan studi tentang politik. Dalam kekuasaan terdapat tiga komponen yaitu: kewenangan, tekanan/Paksaan (force) dan Pengaruh, dan legitimasi.

²² Zakiyuddin Baidhawiy, "Memecahkan kebuntuan teoretik hubungan Islam dan Politik," *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, no. 02, (Desember 2012): 264.

²³ Yusa Gjuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 3.

Kedua, ketertiban. Dalam ilmu politik konsep ketertiban sangat erat kaitannya dengan negara. Karena negara dengan segala kekuasaannya mengeluarkan sejumlah aturan atau produk hukum yang menjadi tujuan salah satunya ialah untuk menciptakan ketertiban didalam masyarakat. *Ketiga*, keadilan. Konsep ini juga penting dalam kehidupan politik serta banyak digunakan diberbagai negara yang mengusung danya hak asasi manusia dan demokrasi.

Keempat, kesejahteraan. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 2 ayat 1 kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketemtraman lahir batin dan memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan pancasila.

Kelima, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan prinsip dasar yang fundamental karena hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa pemerintah selaku pemegang kekuasaan serta pemilik kewenangan yang legal tidak boleh mengambil tindakan yang sewenang-wenang terhadap warga negaranya.²⁴

G. Tinjauan Pustaka

Hubungan Islam dan politik di Indonesia menurut perseptkif Ahmad Syafii Maarif ini sudah banyak yang membahas maupun mengkajinya. Tetapi di sisni, peneliti ingin

²⁴ Yusa Gjuyandi, *Ibid.*, 17.

mencoba menemukan sisi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun tinjauan pustaka yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Leni Marlana, tentang “*Hubungan Islam dan Negara dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif*”. (Jurnal Mathiq, Vol. III No 02 tahun 2008). Tulisan ini membahas tentang konsep negara dalam Islam menurut Ahmad Syafii Maarif yang lebih dekat pada sistem Syura, berbentuk demokratis, dan menjalankan prinsip syura sangat cocok untuk sistem sebuah negara. Tulisan ini juga membahas tentang Hubungan Islam dan Negara menurut Ahmad Syafii Maarif ialah hubungan yang simbiotik, yaitu suatu hubungan yang saling menguntungkan dan bersifat timbal balik.²⁵

Adapun kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Hubungan Islam dan Politik dalam Perspektif Ahmad Syafii Maarif. Namun terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu mengenai teori yang digunakan dan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan ialah metode sejarah. Sedangkan metode penelitian dari artikel tersebut menggunakan metode Deskripif Kualitatif dan jenisnya Librari Reseach. Untuk teori yang digunakan dari penelitian ini dalam menjelaskan hubungan Islam dan Politik adalah teori Hubungan, Islam dan politik. sedangkan

²⁵ Leni Marlana, “Hubungan Islam dan Negara Dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif,” *Manthiq*, no. 02, (2018): 24.

Teori yang digunakan dari tulisan ini adalah Teori Interaksi Simbolik.

2. Ridwan, tentang “*Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna*”. (Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 02, Juli-Desember 2017). Tulisan ini membahas tentang Hubungan Islam dan Politik menurut Hasan Al-Banna, di dalam hasil penelitian itu, dikemukakan pandangan Hasan Al-Banna tentang Islam dan politik yang berisi bahwa agama dan politik memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan.²⁶

Adapun kesamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel dari judul penelitian dimana sama-sama meneliti tentang Hubungan Islam dan Politik di Indonesia. Dan perbedaan dari penelitian ini ialah terdapat pada objek yang diteliti yaitu tokoh yang diambil adalah Hasan Al-Banna sedang penelitian ini mengambil tokoh dari Ahmad Syafii Maarif.

3. Lia Hilya, tentang “*Dinamika Pemikiran Politik Ahmad Syafii Maarif: Tinjauan Terhadap Ideologi Negara*”. (Skripsi, UIN Jakarta, 2009). Dalam Skripsi ini membahas tentang Dinamika politik tentang Islam dan Pancasila serta hubungannya sebagai ideologi negara menurut pandangan Ahmad Syafii Maarif.²⁷ Adapun persamaan dalam penelitian

²⁶ Ridwan, “Hubungan Islam dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna,” *Jurnal Hukum*, no. 02, (Juli-Desember 2017): 234.

²⁷ Liya Hilya, *Dinamika Pemikiran Politik Ahmad Syafii Maarif: Tinjauan Terhadap Ideologi Negara*, (Skripsi, UIN Jakarta, 2009), 10

ini yaitu sama-sama berbicara tentang hubungan dalam perspekti Ahmad Syafii Maarif namun Perbedaannya terdapat pada tinjauan yang digunakanya di mana skripsi ini menggunakan tinjauan terhadap Ideologi Negara yaitu Pancasila. Sedangkan penelitian ini ditinjau dari perspektif Ahmad Syafii Maarif.

4. M. Marfirozi, tentang “*Pandangan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Amien Rais Tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia*” (Skripsi, UINJakarta, 2019). Skripsi ini membahas tentang perbandingan pemikiran dua tokoh yaitu Amad Syafii Maarif dan Amien Rais tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia.²⁸ Adapun persamaanya sama-sama membahas tentang pandangan pemikiran tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia. Terdapat juga perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek yang diambil dari skripsi ini lebih dari satu kemudian metode pendekatan yang digunakan ialah tipe Deskriptis-analitis. Sedangkan penelitian ini hanya fokus pada satu objek tokoh saja yaitu Ahmad Syafii Maarif dan metode penelitiannya menggunakan metode Sejarah dengan pendekatannya Deskriptif dan sifatnya Pure Reseach serta orientasinya Library Reseach dan jenisnya ialah bibliografi.

Semua sumber seperti jurnal yang peneliti gunakan itu dikarena tulisan tersebut kebanyakan hasil penelitian yang masih hangat dibicarakan dan khususnya memiliki kemiripan

²⁸ M Marfirozi, Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Amien Rais Tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesi, (Skripsi, UIN Jakarta, 2019), 113

dengan penelitian ini sehingga peneliti harus menggunakannya untuk melacak perbandingan dari penelitian ini. Sedangkan sumber skripsi yang peneliti gunakan pun sama memiliki kemiripan dengan penelitian ini agar tidak dikhawatirkan terjadinya kesamaan atau plagiarizm dan lain-lain karena itu, peneliti gunakan sebagai perbandingan dengan penelitian ini.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, bentuk dan sifatnya merupakan murni (Pure Research) yang hanya mengemukakan dasar-dasar teoritis, dan tidak ada hubungannya dengan tempat dan lokasi, dan karena sumber primer dari penilitan ini adalah buku-buku karya dari Ahmad Syafii Maarif maka, orientasi dari penelitian ini adalah (Library Research) artinya hanya dalam lingkungan perpustakaan.²⁹

Penelitian ini merupakan peneliian sejarah dengan jenis penelitiannya termasuk penelitian bibliografi yang mencakup hasil pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh pemikir-pemikir dan ahli-ahli. Adapun langkah-langkah dalam penelitian sejarah diantaranya:

1. Pemilihan Subjek yang akan Diteliti

Dalam pemilihan subjek terdapat empat unsur diantaranya:

- a. Bernilai atau yang berarti unik, kekal, dan abadi.

Keunikan dalam topik penelitian ini terdapat pada

²⁹ Abdullah Ali, *Trilogi Riset* (Cirebon: Biro Riset dan Badan Penerbit Fakultas Tarbiyah IAIN Sunang Gunung Djati Cirebon, 1986), 147-148.

pemikirannya atau perspektif dari tokoh yang diambil peneliti.

- b. Keaslian atau orisinalitas. Dalam penelitian ini dibuktikan keasliannya dengan teori-teori yang digunakan dalam topik penelitian ini. Yaitu teori Hubungan, Islam dan Politik.
- c. Praktis dan Efisien artinya dapat terjangkau sumbernya serta memiliki hubungan dengan sebuah peristiwa itu. Dan dalam topik penelitian ini sumber atau data yang dibutuhkan sangat mudah terjangkau bahkan melimpah karena tokoh yang diteliti banyak menerbitkan karya-karya bukunya.
- d. Kesatuan artinya unsur-unsur yang menjadi data atau sumber sejarah memiliki satu kesatuan ide. Dalam penelitian ini terdapat sumber-sumber yang didapat tentunya memiliki satu kesatuan ide dengan tokoh yang diteliti karena dengan itu akan memudahkan dalam penelitian selanjutnya.³⁰

2. Heuristik

Heuristik dalam bahasa Yunani ialah heuristiken yang artinya menemukan atau mengumpulkan sumber. Dalam hal ini sumber sejarah berupa catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lain yang dapat memberikan gambaran tentang suatu peristiwa.³¹ Sumber yang digunakan peneliti dalam hal ini ialah sumber

³⁰ Anwar Sanusi, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013), 136.

³¹ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2014), 219.

tulisan, adapun sumber lisan disini meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang peneliti gunakan ialah buku-buku karya Ahmad Syafii Maarif, karena buku-buku tersebut jelas merupakan karya dari Ahmad Syafii Maarif yang berisikan semua persepektifnya mengenai berbagai persoalan khususnya tentang Islam dan politik. Dan itu sangat penting untuk peneliti gunakan dalam menganalisis tokoh tersebut. Semua pandangannya mengenai Islam dan Politik telah ia tuliskan dalam karya-karyanya tersebut. Karya-karya yang dimaksud yaitu: *Buku Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin* (1996), *Buku Islam dalam Bikang Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (2009), *Buku Islam dan Pancasila*, *Buku Membumikan Islam* (1995), *Buku Islam dan Politik Membingkai Peradaban* (1999), *Buku Titik-Titik di Perjalanan Ku* (2006), *Buku Islam dan Politik Di Indonesia* (1988), *Buku Dinamika Islam* (1984), *Buku Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia Dalam Aspirasi Umat Islam Indonesia* (1983). Sumber primer lain yang peneliti temukan ialah buku karya Mukhrizal Arif tentang *Islam dan Pendidikan Pluralisme: Studi Pemikiran Ahmad Syafii Maarif*.

Pengumpulan sumber ini antara lain didapat dengan mencari di Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Perpustakaan Fakultas FUAD, Perpustakaan 400 Cirebon, aplikasi Ipusna dan dengan membeli buku-buku terkait di toko buku terdekat Gramedia Cipto Cirebon.

3. Verifikasi

Setelah melakukan pengumpulan sumber, langkah

selanjutnya ialah verifikasi, atau kritik sejarah, atau keabsahan sumber. Di dalam verifikasi ada dua macam, autentisitas, atau keaslian sumber bisa juga dikatakan sebagai kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kritik intern.³² Dalam hal ini, peneliti melakukan verifikasi dengan kritik intern yaitu dengan membandingkan tulisan satu dengan yang lainnya dari isi sumber tulisan tersebut.

Dengan ini peneliti melakukan perbandingan isi dari sumber primer yaitu buku-buku karya Ahmad Syafii Maarif dengan buku-buku lain yang bukan karya Ahmad Syafii Maarif.

4. Interpretasi

Tahapan interpretasi, pada tahapan ini fungsi utamanya terdapat pada interpretasi itu sendiri. Dimana, interpretasi itu artinya menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta (facts) atau bukti-bukti sejarah (evidences). Mengapa diperlukan? karena, pada dasarnya bukti-bukti sejarah itu sebagai saksi (witness) realitas di masa lampau adalah hanya saksi-saksi bisu semata.³³ Proses kerja interpretasi ialah dengan melibatkan berbagai aktivitas mental yakni seleksi, analisis, komparasi serta kombinasi dan berakhir di sintesis.³⁴ Dalam Proses ini, peneliti harus berusaha sampai pada pengertian faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya sebuah peristiwa. Oleh karenanya, peneliti memerlukan pemahaman mengenai masa lalu agar dapat mengetahui keadaan pelaku, tindakan dan tempat peristiwanya.

³² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 77.

³³ A Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 81.

³⁴ Eva Syarifah Wardah, "Metode Penelitian Sejarah," *Tsqofah*, no. 02 (Desember 2014): 174.

Untuk melakukan analisis data sesuai dengan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan biografi dan teori hubungan, Islam dan politik.

Pendekatan biografi digunakan peneliti untuk menjabarkan latar belakang kehidupan dari Ahmad Syafii Maarif dimulai dari keluarga, pendidikan dan karyanya. Sedangkan teori hubungan, Islam dan politik digunakan untuk membantu menganalisis hubungan Islam dan Politik di Indonesia masa orde baru dalam perspektif Ahmad Syafii Maarif.³⁵

5. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan sebuah proses penyusunan fakta sejarah serta merangkai fakta tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis serta masuk akal. Dari fakta-fakta yang sudah terkumpulkan dan melewati empat tahapan di atas, yang kemudian di tahap ini akan disusun, serta ditafsirkan agar memiliki bentuk dan stuktur. Bagi seorang sejarawan bermodal interpretasi yang bersifat deskriptif saja belum cukup, namun perlu adanya adanya landasan penafsiran yang digunakan. Maka di tahap inilah peran peneliti sangat dibutuhkan dalam mencari landasan penafsiran dari fakta-fakta yang ada.³⁶

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

³⁵ Danang Aji Saputra, "Kebijakan Ahmad Syafii Maarif dalam Memimpin Muhammadiyah 1998-2005," (Skripsi, UIN Yogyakarta, 2019), 15.

³⁶ Anwar Sanusi, Pengantar Ilmu Sejarah (Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013), 138.

Pada bab ini akan penulis paparkan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan masalah dan kegunaan, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II ISLAM DAN POLITIK MASA ORDE BARU

Pada bab ini akan berisikan tentang awal mula lahirnya masa orde baru, lalu dilanjutkan dengan dinamika Islam dan Politik di masa orde baru.

BAB III HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK MASA ORDE BARU MENURUT PERSPEKTIF AHMAD SYAFII MAARIF

Pada bab ini akan berisikan tentang , berikut tentang masuk biografi Ahmad Syafii Maarif, serta pemikiran Islam dan politik menurut perspektif Ahmad Syafii Maarif dan hubungan Islam dan politik masa orde baru menurut perspektif Ahmad Syafii Maarif.

BAB IV DAMPAK RELASI ISLAM DAN POLITIK MASA ORDE BARU MENURUT PERSPEKTIF AHMAD SYAFII MAARIF

Pada bab ini akan berbicara tentang dampak yang terjadi dari adanya relasi antara Islam dan Politik di masa orde baru menurut Ahmad Syafii Maarif dan apa saja dampaknya.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini akan berisi simpulan yang ringkas dan padat yang memiliki poin-poin dari pembahasan dalam penelitian ini dan berisikan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini.